



**► PEMBANGUNAN WILAYAH**

## Pembukaan Keran Hotel Ditanggapi Negatif

Abdul Hamied Razak, Sunartono, & Rheisnayu Cyntara  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

JOGJA—Pencabutan moratorium hotel ditanggapi negatif oleh DPRD Kota Jogja. Sementara, pakar menyarankan hotel baru dikembangkan secara vertikal untuk menyasiasi keterbatasan lahan.

Sejumlah anggota DPRD Kota Jogja meminta Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota No.85/2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel dicabut. Peraturan tersebut mengizinkan pendirian hotel baru, khusus untuk hotel bintang empat dan lima.

Nasrul Khoiri, Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja menilai Perwal No.85/2018 kontraproduktif dengan aspirasi masyarakat banyak. "Perwal itu mengabaikan aspirasi masyarakat dan menegaskan Pemkot lebih condong kepada kepentingan investor," ujar Nasrul yang juga menjabat Ketua Fraksi PKS Jogja, Kamis (3/1).

Menurut dia, Pemkot Jogja seharusnya menyelesaikan beberapa masalah penyalahgunaan izin sebelum mencabut moratorium hotel.

Nasrul juga mengatakan banyak kelompok yang mengeluh lantaran proyek-proyek bangunan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan hidup.

Pemkot tidak pernah melibatkan DPRD dalam menyapkan pencabutan moratorium, padahal kedudukan DPRD tidak boleh diabaikan begitu saja," kata Anggota Badan Anggaran DPRD Jogja itu.

Wakil Ketua Fraksi PDIP Antonius Foki Ardianto berencana menggalang dukungan untuk menggunakan hak mempertanyakan pencabutan moratorium hotel bintang empat dan lima kepada Wali Kota Jogja.

"Kami akan galang dukungan anggota Dewan untuk mempertanyakan kebijakan ini," ujar dia.

### HOTEL SELALU PENUH TIAP LIBURAN

Hotel di DIY, termasuk Kota Jogja, selalu penuh saban liburan. Di libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 kemarin, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY bahkan mengklaim banyak hotel yang sampai menolak tamu.

Hotel di Ring I, II, maupun II semua terisi penuh dengan rata-rata lama menginap dua malam.

Tingkat hunian pada hotel bintang satu, terendah dari semua kelas hotel.

Kategori	Jumlah Tamu	Persentase
Hotel bintang maupun nonbintang anggota PHRI DIY	410.437	71,77%
Tamu yang menginap selama November 2018, nyaris setara dengan penduduk Kota Jogja.	449.799	231
Tamu yang menginap selama September 2018.	33,11%	

Hotel bintang maupun nonbintang anggota PHRI DIY

Tamu yang menginap selama November 2018, nyaris setara dengan penduduk Kota Jogja.

Tamu yang menginap selama September 2018.

Tingkat hunian hotel bintang lima. Ini adalah tingkat hunian tertinggi dari semua kelas hotel.

“Siklus ini sebenarnya merupakan siklus tahunan yang selalu berulang di kota tujuan wisata. Setelah Juli, grafik TPK [tingkat penghunian kamar] akan naik terus. Nanti pada Januari saat Eropa mulai musim panas, grafik juga akan naik. Sementara ini data Desember belum keluar tapi jika dilihat siklus tahunan maka grafik akan naik.”

JB Priyono Kepala BPS DIY

► Halaman 10

Graphic: Tri Margono | Sumber: Wawancara (diy)

## Pembukaan Keran...

Rabu (2/1), Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan izin pendirian hotel bintang empat dan lima dibuka karena Jogja harus menghadapi kemungkinan melonjaknya jumlah wisatawan setelah New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo beroperasi mulai April 2019.

Dia menegaskan persyaratan pendirian hotel bintang empat dan lima tidak akan mudah dipenuhi oleh pengusaha. Sebab, hotel bintang empat dan lima memiliki beberapa standar yang disesuaikan dengan penataan wilayah, seperti lahan yang luas, kapasitas dan ketersediaan jumlah kamar, fasad bangunan yang harus sesuai dengan kawasan hotel dibangun, lolos uji analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, serta ketersediaan lahan parkir. Selain itu, investor wajib menggunakan air PDAM dan tidak boleh menggunakan air sumur dalam.

### Pembangunan Vertikal

Pengamat transportasi dari Universitas Islam Indonesia (UII) Arif Wisnadi mengatakan meskipun lahan di Kota Jogja terbatas, kepadatan wilayah ini masih rendah. Musababnya, rata-rata bangunan yang berdiri banyak menggunakan satu dan dua lantai. Jika Pemkot Jogja bersama investor punya visi jangka panjang, kata Arif, pembangunan fasilitas wisata harus menggunakan konsep vertikal atau rumah susun.

Dia menyarankan Pemkot Jogja tidak mengizinkan pembangunan di jalur hijau. "Jalan pintas untuk mengambil alih lahan hijau di sekitar bantaran sungai sebaiknya dicegah meski mungkin sudah di luar area

sempadan sungai, karena kawasan hijau yang tersisa tersebut merupakan koridor hijau yang harus dikonservasi untuk satwa berpindah, berinteraksi dan berkembang biak, dari hulu ke hilir dan sebaliknya," tutur dia.

Adapun Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta Pemkot Jogja lebih selektif memberikan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jangan setiap izin diberikan. Jika perlu, syaratnya sebaiknya detail, hingga penentuan jumlah total kamar."

HB X mengatakan pemberian izin juga perlu mempertimbangkan luas tanah agar hotel tidak memakan banyak lahan. Dia menyarankan hotel dibangun secara vertikal dan tetap memperhatikan tinggi maksimal bangunan sesuai ketentuan keselamatan penerbangan.

"Jangan luas-luas, naik saja, jangan melebar," ujar Sultan.

### Belum Cukup

Saat ini, terdapat 231 hotel anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY. Ratusan hotel itu belum mampu menampung jumlah pelancong yang bermalam di provinsi ini, contohnya saat libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Ketua PHRI DIY Istidjab Danunagoro mengatakan pada masa libur akhir tahun lalu, semua hotel di Ring I, II, maupun III terisi penuh. "Bahkan kami sampai menolak tamu. Alhamdulillah luar biasa liburan Natal dan Tahun Baru kali ini, rata-rata lama tinggalnya dua malam," kata dia kepada *Harian Jogja*, Kamis.

Berdasarkan data BPS DIY, kenaikan jumlah tamu hotel sudah terjadi sejak

November lalu. Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang pada November 2018 secara rata-rata tercatat sebesar 63,51%, atau naik 5,91 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 57,60%. Kenaikan TPK tertinggi terjadi di hotel bintang empat sebesar 8,13 poin, sementara kenaikan terendah terjadi pada hotel bintang lima yaitu sebesar 3,04 poin.

Adapun TPK tertinggi mencapai besaran angka 71,77% dicapai oleh hotel bintang lima dan TPK terendah tercatat 33,11% pada hotel bintang satu. "Tapi jika dibandingkan dengan tahun lalu, TPK hotel bintang November 2018 menurun sebesar 0,36 poin," ujar Kepala BPS DIY JB Priyono, Rabu.

Sementara itu, TPK hotel nonbintang dan usaha akomodasi lain pada November 2018 secara rata-rata tercatat sebesar 27,98%. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 3,68 poin dibandingkan dengan TPK bulan sebelumnya. Priyono mencatat seluruh kelompok kamar mengalami kenaikan TPK, dengan kenaikan TPK paling besar tercatat 4,68 poin terjadi pada kelompok kamar lebih dari 40, sedangkan kenaikan TPK terendah adalah kelompok kamar kurang dari 10 yaitu sebesar 1,98 poin.

Priyono menambahkan rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang pada November 2018 secara keseluruhan sebesar 1,59 malam atau turun 0,07 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Adapun lama menginap terpanjang adalah 1,88 malam di hotel bintang lima dan lama menginap terpanjang selama 1,40 malam terjadi di hotel bintang dua.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005